

# BAB I

## PENDAHULUAN

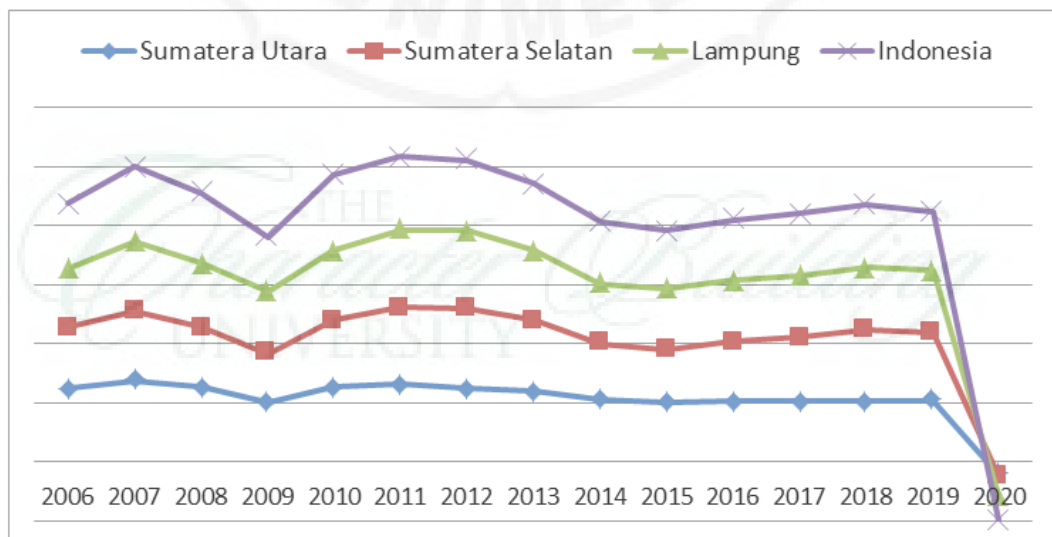
### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu permasalahan ekonomi makro dalam jangka yang panjang. Perekonomian suatu negara ataupun daerah akan dikatakan bertumbuh ketika aktivitas ekonomi masyarakatnya semakin bertambah sehingga bisa menghasilkan atau memproduksi barang ataupun jasa yang lebih besar dan lebih berkualitas. Secara nasional ataupun daerah bertambahkan pertumbuhan ekonomi menjadi target pembangunan. Sehingga tolak ukur pencapaian pembangunan atau prestasi pembangunan salah satunya adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun berikutnya sebagai akibat dari adanya peningkatan faktor-faktor produksi. Ekonomi suatu negara atau daerah dikatakan bertumbuh apabila aktivitas ekonomi masyarakatnya semakin berkembang sehingga barang ataupun jasa yang diproduksi juga ikut bertambah jumlahnya yang pada akhirnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. (Sukirno, 2005).

Setiap negara memiliki tujuan untuk bertambahkan kesejahteraan dan kelayakan hidup seluruh masyarakatnya. Tujuan tersebut juga merupakan target pembangunan, sehingga untuk mencapai tujuannya negara memerlukan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi ialah gambaran perubahan keadaan ekonomi menuju keadaan yang lebih baik dari

waktu ke waktu dan kondisi tersebut terjadi secara konsisten dan terus menerus. (Hasyim, 2017). Dalam studi ekonomi makro, pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat di ukur dengan melihat pendapatan Merujuk pada harga konstan yang didapat negara ataupun daerah (Sukirno, 2004).

Merujuk pada data BPS, dalam kurun waktu 2006-2020 rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara lebih besar dibanding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional. Akan tetapi apabila dikomparasi dengan beberapa provinsi di pulau Sumatera yakni Sumatera Selatan dan Lampung pertumbuhan ekonomi Sumatera masih tertinggal. Selain dari itu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga terlihat sangat sensitif, dimana sering terjadi penurunan yang kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain yang terlihat lebih stabil. Terlihat pada gambar 1.1 berikut ini.

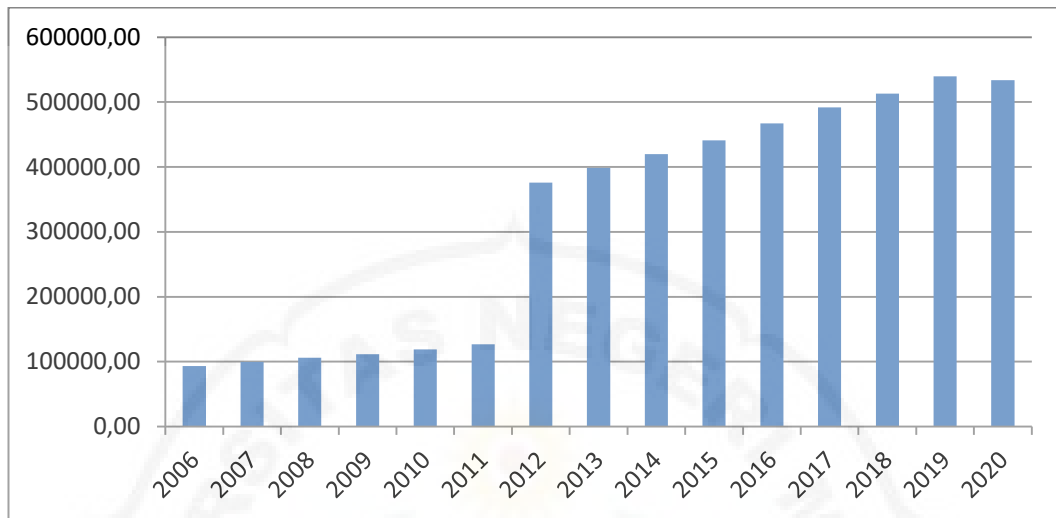


Sumber : Badan pusat statistik, 2006-2020 (data diolah)

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2006-2020**

Suatu fenomena yang unik dan menarik untuk dikaji yang dimana sumber daya alam dan prasarana penunjang relatif sama di antara provinsi tersebut bahkan jumlah penduduk dan luas wilayah provinsi Sumatera Utara adalah yang lebih besar dibanding provinsi lain di pulau Sumatera. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Todaro (2006) jumlah penduduk yang tinggi akan memicu tingginya angka tenaga kerja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara di dalam kasus ini laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lebih lambat dan tertinggal dari provinsi Lampung dan provinsi Sumatera Selatan. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2008 mencapai 6,04% dan pada tahun 2009 5,71%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2018 hanya mencapai 5,18% dan tahun 2019 hanya mencapai 5,22%.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara tradisional dijalankan dengan menghitung bertambahnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto untuk daerah.. PDB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah tertentu, atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam kurun waktu tertentu (Karya dan Syamsuddin 2017). Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat didapat dengan laju pertumbuhan nilai PDRB per tahun.



Sumber: BPS sumatera utara, 2006-2020 (data diolah)

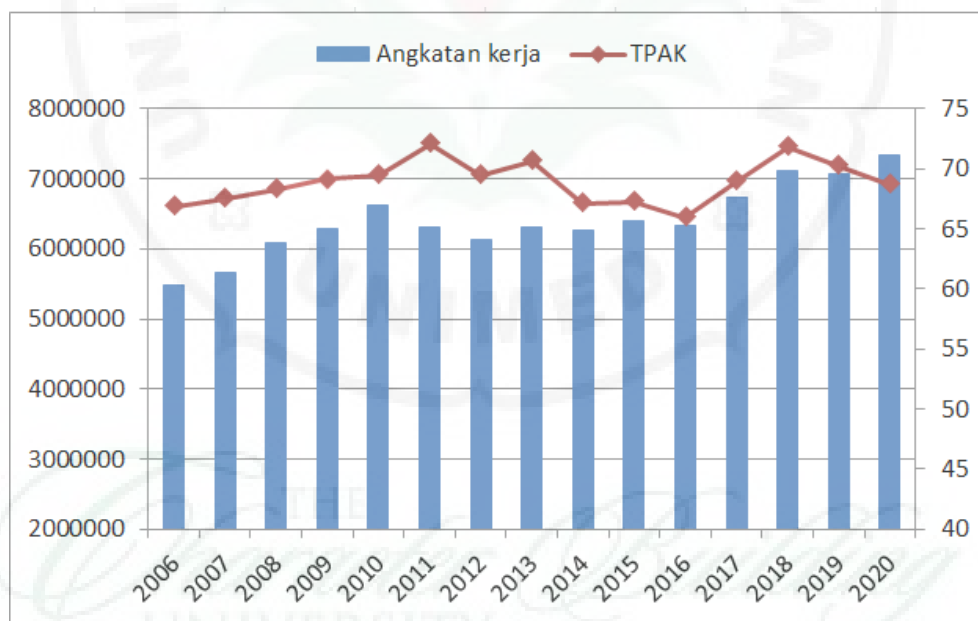
**Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2006-2020**

Dari gambar 1.2 di atas diketahui bahwa PDRB Sumatera Utara selama periode tahun 2006-2020 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2006 PDRB di Sumatera Utara adalah sebesar Rp 93.347,40 milyar. Dan meningkat terus hingga tahun 2020 sampai dengan sebesar Rp 533.746,36 milyar. Meskipun jika dilihat dari total Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan Provinsi Sumatera Utara selalu meningkat, akan berbeda jika dilihat dari persentasenya. Persentase pertumbuhan yang diperoleh selalu mengalami fluktuasi selama periode tersebut.

Naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Merujuk pada Samuelson dan Nordhaus (2005), faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, dan teknologi. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi jangka panjang, dan dianggap sebagai faktor positif pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti halnya

ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Jumlah penduduk dapat menjadi pendorong juga dapat menjadi penghambat di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang aktif dalam perekonomianlah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui penduduk yang aktif dalam perekonomian dapat dilihat dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Dengan bertambahnya produktivitas angkatan kerja diharapkan akan menambahkan produksi, yang nantinya PDRB juga akan bertambah.



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2006-2020 (data diolah)

**Gambar 1.3 Jumlah Angkatan Kerja Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2020**

Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera diketahui bahwa selama periode tahun 2006-2020 jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara selalu

mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara tahun 2006 adalah sebanyak 5.491.696 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,9 persen. Sampai dengan tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 7.350.057 jiwa dengan tingkat partisipasi sebesar 68,67 persen. Meskipun angkatan kerja di Provinsi Sumatera utara cenderung bertambah dalam kurun 2006-2020, tetapi dalam beberapa kasus saat angkatan kerja maupun tingkat partisipasi angkatan kerja naik atau bertambah justru pertumbuhan ekonomi menurun dan di sisi lain saat angkatan kerja turun pertumbuhan ekonomi justru bertambah. Fenomena tersebut menggambarkan pengaruh yang negatif antara angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

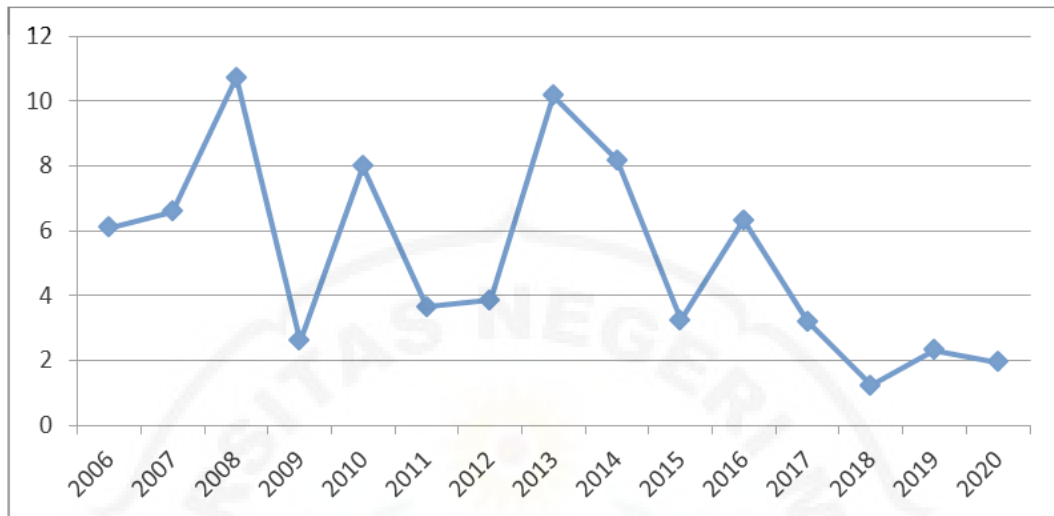
Sementara studi yang dijalankan oleh Citra Ayu Basica Effendy Lubis dan penelitian yang dijalankan oleh Dwi suryanto memperoleh hasil bahwasanya tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Merujuk pada Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap menjadi suatu faktor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih banyak akan mengakibatkan ukuran pasar domestiknya lebih besar. Namun, hal itu masih jadi pertanyaan, apakah laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berakibat positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu alat untuk mengukur kestabilan perekonomian sebuah negara dalam ekonomi makro ialah dengan memakai inflasi. Setiap perubahan dalam inflasi ini akan berefek pada naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah

permasalahan ekonomi yang sangat ditakuti oleh setiap negara. Inflasi sendiri ialah kecenderungan harga-harga yang naik secara umum serta terus-menerus (Boediono, 1999).

Inflasi sangat memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. inflasi yang bertambah sedikit demi sedikit cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana ketika harga suatu barang atau jasa bertambah para produsen akan mamacu produksi barang atau jasa tersebut. Di sisi lain keadaan tersebut akan menyerap tenaga kerja dan selanjutnya produktivitas bertambah dan pertumbuhan ekonomi pun bertambah. Sedangkan inflasi yang tinggi dapat mengguncang perekonomian.

Sebab inflasi yang tinggi daya beli individu dan masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap akan menurun yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat juga menurun. Dan dalam jangka panjang keadaan ekonomi akan semakin memburuk apabila inflasi tersebut tidak bisa di kontrol. Sebab secara tidak langsung ketika harga-harga naik daya beli masyarakat menurun berarti produktivitas suatu perusahaan juga menurun artinya keadaan ekonomi perusahaan juga akan memburuk ditambah dengan tuntutan kenaikan gaji pekerja. Hal tersebut akan menghambat investasi dan akan berimbas pada laju pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2006-2020 (data diolah)

**Gambar 1.4 Inflasi Kumulatif Tahunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2020**

Gambar di atas memperlihatkan keadaan inflasi di Sumatera Utara pada tahun 2006-2020. Merujuk pada grafik tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Inflasi Sumatera Utara selalu mengalami pertambahan dan penurunan. Inflasi pada tahun 2006 adalah 6,11 persen dan tahun 2020 tingkat inflasi di Sumatera menurun menjadi 1,6 persen. Inflasi tertinggi Sumatera dalam kurun waktu 2006-2020 terjadi pada tahun 2008 yakni mencapai 10,72 persen. Saat kenaikan inflasi tersebut tinggi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tetap bertambah. Justru saat inflasi yang rendah pada 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Sedangkan pada penelitiannya Safitryana (2020) disebutkan bahwa inflasi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif serta signifikan.

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan peran pemerintah. Merujuk pada Todaro (2006), pemerintah harus diakui dan dipercaya agar dapat berperan lebih banyak dan menetapkan dalam usaha mengelola perekonomian nasional atau

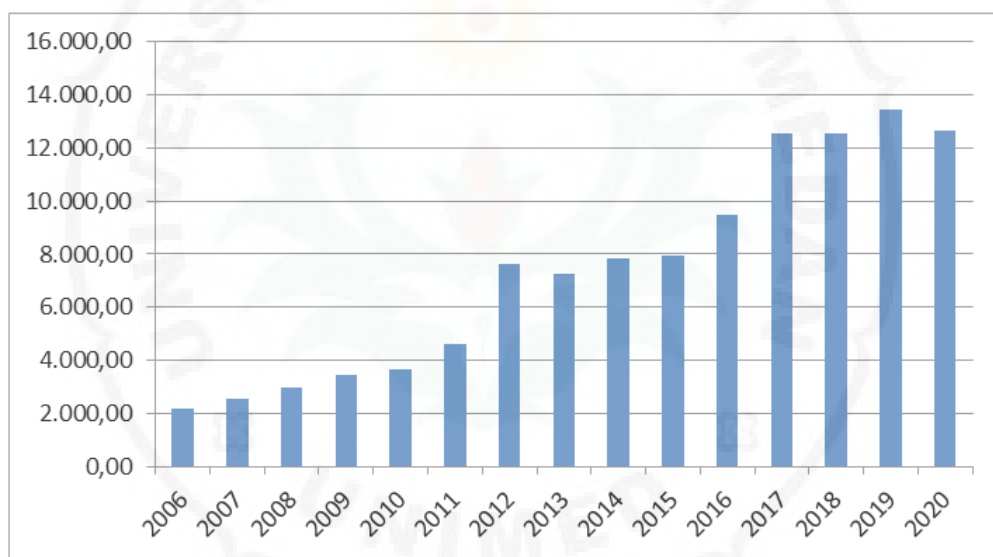


daerah. Merujuk pada Mangkoesobroto (2001), peran pertama yang harus dimainkan oleh pemerintah adalah alokasi, yakni pemerintah berupaya mengefisienkan alokasi sumber daya ekonomi, terutama dalam menyediakan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta. Kedua, peran distribusi, yakni pemerintah mengubah keadaan sosial melalui kebijakan fiskal agar sejalan dengan distribusi pendapatan yang diharapkan, dan melalui pemungutan pajak progresif, yakni mereka yang bisa menanggung beban yang relatif besar. beban pajak dan membagikannya kepada mereka yang kurang bisa. Ketiga, efek stabilisasi, yakni pemerintah merumuskan kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan guncangan ekonomi yang berlebihan.

APBD menetapkan kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan belanja pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari jumlah belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBD. Pengeluaran pemerintah yang terlalu sedikit tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional baik untuk pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah yang boros tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Namun secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan (Marganda & Sirojuzilam, 2009).

Kendala yang dirasakan oleh pemerintah daerah memaksa pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Usaha peningkatan pendapatan sendiri hanya bisa dijalankan dengan syarat dan program tertentu sebab pada umumnya kebijakan tersebut justru dapat menambah beban masyarakat. Sebab pemerintah adalah penggerak dan pemberi kebijakan dalam perekonomian masyarakat. Kebijakan pemerintah akan menetapkan arah perekonomian masyarakatnya.

Pengeluaran pemerintah ialah kebijakan pemerintah guna menjalankan fungsinya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. kebijakan pemerintah seperti pengeluaran pemerintah ini juga dapat menambahkan produktivitas masyarakat seperti pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan jalan raya. Secara langsung ataupun tidak langsung hal tersebut akan menambahkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Raharjo, 2006).



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2006-2020 (data diolah)

### Grafik 1.5 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2020

Gambar 1.4 merupakan gambaran pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2020. Pengeluaran pemerintah provinsi utara mengalami fluktuasi selama tahun 2006-2020. Pada tahun 2013 dan tahun 2018 pengeluaran pemerintah memperlihatkan hubungan yang negatif dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumut. Sementara Merujuk pada teori para ahli dan studi terdahulu seperti studi yang dijalankan oleh Rusdi and Haerati (2012), pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti mencoba meneliti bagaimana pengaruh angkatan kerja, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu peneliti mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi didefinisikan sebagai kumpulan persoalan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Identifikasi masalah dijalankan agar penelitian terarah dan cakupan masalah tidak terlalu luas. Merujuk pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat di ambil identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2000-2021.
2. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara bertambah tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.
3. Dalam beberapa kasus inflasi di Provinsi Sumatera Utara justru berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Merujuk pada pembatasan masalah diatas berarti peneliti hanya membatasi permasalahan penelitian ini hanya membahas pada “Pengaruh Angkatan Kerja, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2020”.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah terdapat pengaruh antara angkatan kerja, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, berarti yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara angkatan kerja, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

## **1.6 Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh angkatan kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara, dan dapat bermanfaat untuk bahan referensi ilmiah untuk penelitian lainnya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a) Bagi Peneliti**

Untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi tugas akhir dalam menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

#### **b) Bagi pemerintah**

Sebagai kajian dan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam bertambahkan pertumbuhan ekonomi.

#### **c) Bagi Akademis**

Sebagai referensi untuk dalam memberi informasi serta tambahan literatur untuk studi-studi selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian serupa.